

Analisis Penerapan Metode Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 335 pada Tiga Entitas Nirlaba Yayasan di Kabupaten Tanah Datar

Intan Salsabilla¹, Diva Avivah², Yona Amelia Agustin³, Dhilsy Faisya Azzahra⁴, Muchlas Hamdani⁵, Sri Adella Fitri⁶

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail : intan.ssbilla@gmail.com

Article Informations

Received:
(19-05-2026)

Accepted
(20-07-2026)

Available Online :
(01-08-2026)

Keywords

ISAK 335, Financial Statements, Non-Profit Entity

Abstract

As a primary instrument for non-profit organizations, financial statements play an important role in realizing transparency towards stakeholders. ISAK 335 is the latest regulation replacing ISAK 35 and PSAK 45, serving as a guideline for the presentation of financial statements of non-profit entities in Indonesia. This study aims to examine the conformity of financial recording practices applied by three non-profit entities in Tanah Datar Regency, namely Aisiyiah Orphanage of Batusangkar Branch, Muhammadiyah Orphanage of Lima Kaum Branch, and Al-Ikhlas Dharma Wanita Foundation at Al-Ikhlas Private Madrasah Ibtidaiyah Batusangkar, based on the ISAK 335 standard. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through direct observation at each institution and semi-structured in-depth interviews addressed to treasurers and administrative staff directly responsible for financial management in the three entities. Data analysis refers to the interactive model of Miles and Huberman through three stages: data reduction by summarizing, selecting, and simplifying raw data into verbatim transcripts accompanied by coding; data presentation in the form of comparative matrices and systematic narrative descriptions; and conclusion drawing verified through member checking and data source triangulation. The findings indicate that the three entities have not adequately conducted financial recording in accordance with the ISAK 335 standard. Their recording practices remain simple and limited to cash receipts and disbursements, without presenting a Statement of Financial Position, Statement of Changes in Net Assets, Statement of Comprehensive Income, Statement of Cash Flows, nor Notes to the Financial Statements. This condition is caused by limitations in human resources with accounting competencies, a lack of financial training, and the management's low awareness of accounting recording regulations.

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai organisasi nirlaba terbanyak di dunia. Salah satunya adalah Yayasan. Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 menunjukkan bahwa hingga tahun tersebut tercatat lebih dari 380 ribu yayasan yang terdaftar secara resmi di seluruh Indonesia (Direktorat, 2022), belum termasuk yang belum berbadan hukum namun tetap beroperasi dengan aktif di masyarakat. Yayasan-yayasan ini bergerak di berbagai

bidang, diantaranya bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, keagamaan, pendidikan, hingga lingkungan hidup.

Yayasan dan organisasi nirlaba pada umumnya memegang peranan sosial yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi mereka bukanlah sekadar pelengkap struktur sosial, melainkan menjadi andalan nyata bagi kelompok-kelompok masyarakat yang luput dari jangkauan layanan negara. Mereka beroperasi bukan untuk mencari laba, tetapi untuk mengabdikan pada kepentingan umum. Karena orientasi nirlaba inilah, kewajiban untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap publik serta para pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat fundamental. Laporan keuangan pun hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban yang konkret. Akan tetapi, dalam realitas di lapangan, masih banyak yayasan yang bergulat dengan persoalan rumit dalam pencatatan keuangan mereka, misalnya kesulitan membedakan secara konsisten antara dana terikat dan dana tidak terikat, ketiadaan pemisahan yang jelas antara aset operasional dengan aset sosial, serta rendahnya penerapan standar akuntansi khusus untuk entitas nirlaba seperti ISAK 35 atau PSAK 45. Dampaknya, laporan keuangan yayasan kerap tidak mampu menggambarkan keadaan sebenarnya dari pengelolaan dana publik, bahkan rawan diselewengkan untuk keperluan pribadi para pendiri atau pengurus. Kondisi ini sungguh mencederai kepercayaan masyarakat sekaligus meruntuhkan hakikat yayasan sebagai institusi sosial yang semestinya transparan dan bertanggung jawab. Yayasan tidak hanya ada di kota-kota besar. Di salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat telah berdiri beberapa yayasan yang bergerak di berbagai bidang. Diantara yayasan-yayasan tersebut adalah Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar, Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum, dan Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlas Batusangkar

Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar berdomisili di Nagari Baringin, Kec.Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Panti asuhan ini termasuk dalam yayasan yang bergerak di bidang sosial. Dalam hal pencatatan keuangan, panti asuhan masih melakukannya dengan sederhana yaitu dicatat manual dan menggunakan excel sederhana yang terdiri dari keterangan, Jumlah Pemasukan, dan Jumlah Pengeluaran. Pencatatan keuangan di Panti Asuhan ini dilakukan oleh seorang bendahara dengan latar belakang pendidikan bukan dari akuntansi. Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar menerima dana berupa hibah, donasi (tetap dan tidak tetap), dan mendapatkan dana dari pendapatan tahunan melalui sewa tempat (diterima pertahun). Pada yayasan ini, laporan keuangan yang dihasilkan belum sistematis dan terstruktur sebagaimana pada ketentuan yang berlaku, yaitu ISAK 335.

Begitu pula pada Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Panti asuhan ini memiliki dua asrama yang terpisah, yaitu asrama putri dan asrama putra. Dalam hal pencatatan keuangan, kedua asrama ini digabungkan karena dikelola oleh bendahara yang sama dan bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan masih sederhana, dicatat di buku secara manual dan di Excel. Laporan yang disajikan berupa kas masuk dan kas keluar. Dana yang diterima oleh Panti Asuhan adalah dana hibah (diterima pertahun) dan donasi (tetap dan tidak tetap). Meskipun telah dicatat dengan rapi, namun masih belum sesuai dengan ketentuan ISAK 335 yang berlaku.

Lain halnya dengan Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Ikhlas Batusangkar. Cabang yayasan ini bergerak di bidang pendidikan. Dana yang diterima oleh Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Al-Ikhlas

berasal dari dana hibah, dana BOS, dan dana dari donatur (tidak tetap). Namun, dalam hal pencatatan laporan keuangan. Kondisinya sama dengan kedua yayasan sebelumnya. Dimana faktor utamanya adalah karena sumber daya manusia yang belum memadai dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Ketentuan ISAK 335 yang berlaku.

ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) 335 adalah aturan terbaru yang mengatur bagaimana organisasi nirlaba (seperti yayasan, panti asuhan, gereja, pesantren, dan lembaga sosial lainnya) harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka di Indonesia. ISAK 335 berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 dan merupakan versi penomoran baru dari ISAK 35 (IAI, 2025). ISAK 335 menawarkan panduan yang lebih lengkap mengenai transparansi dan pertanggungjawaban laporan keuangan entitas nirlaba. Standar ini tidak hanya mengatur tata cara penyusunan laporan, tetapi juga menekankan pada pentingnya penyajian informasi yang mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan seperti donatur, publik, dan lembaga mitra (Prayitno, 2025).

Dengan mulai diterapkannya ISAK 335, pentingnya standar ini bagi sebuah yayasan tidak lagi hanya bersifat kewajiban administratif semata, melainkan telah menyentuh aspek kelangsungan hidup dan citra lembaga di mata publik. Penerapan pencatatan yang sesuai ISAK 335 memungkinkan yayasan untuk membuat laporan yang mampu memisahkan secara gamblang antara dana yang memiliki batasan penggunaan (misalnya donasi yang hanya boleh dialokasikan untuk program tertentu) dan dana yang bebas digunakan untuk operasional, sehingga para pemberi donasi dapat memahami dengan jelas alur pemanfaatan setiap sumbangan yang mereka berikan. Lebih jauh lagi, standar ini mengharuskan adanya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, serta laporan arus kas yang terintegrasi satu sama lain, yang secara langsung memperkuat kepercayaan publik, pemerintah, dan mitra donor dari luar negeri terhadap kredibilitas yayasan. Bagi yayasan yang sungguh-sungguh menjalankan misi kemanusiaan dan sosialnya, mengikuti ISAK 335 menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan yang lestari, mencegah kemungkinan penyelewengan dana, serta memperlancar proses pemeriksaan oleh auditor eksternal. Sebaliknya, yayasan yang tidak mengindahkan standar ini berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat, mengalami kesulitan memperoleh hibah atau bantuan di masa mendatang, bahkan dapat dikenakan sanksi dari instansi berwenang. Dengan demikian, ISAK 335 bukanlah sebuah beban tambahan, melainkan landasan bagi tata kelola yayasan yang bersih, profesional, dan penuh tanggung jawab di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterbukaan informasi saat ini.

Sejumlah penelitian yang terdahulu telah menunjukkan bahwa penerapan ISAK 35 dan ISAK 335 pada entitas/organisasi nirlaba di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang serupa. (Fitri et al., 2025) menemukan bahwa Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Hamzah Ludin belum menerapkan ISAK 335 sama sekali, sehingga mereka mengusulkan metode penerapan sekaligus menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia akuntansi nirlaba. Sama halnya dengan (Tartila et al., 2023) dalam pendampingan di Yayasan Puri Ratna Juwita mengungkapkan bahwa yayasan tersebut sebelumnya tidak memiliki laporan keuangan terstruktur, dan setelah pendampingan baru mulai mampu menyusun laporan meskipun masih dalam tahap awal. (Nurhidayat & Dewantara, 2026) juga memastikan bahwa sebagian besar yayasan kemanusiaan yang mereka teliti masih dalam masa transisi dan belum sepenuhnya memenuhi komponen laporan keuangan yang disyaratkan, sehingga panduan praktis yang mudah diakses sangat diperlukan.

Kondisi informal dan kurang terstruktur juga ditemukan oleh (Iliyini & Pratiwi, 2023) pada Yayasan Panti Asuhan Attafakur, di mana pengelolaan keuangan masih bersifat informal dan pertanggungjawaban kepada donatur publik belum dilakukan secara standar. Hambatan serupa diidentifikasi (Saharani & Abdullah, 2025) pada Yayasan Hidayatullah Kabupaten Kepahiang, yang baru memulai adaptasi terhadap ISAK 335 namun terhambat oleh ketidaktersediaan tenaga akuntansi kompeten. Sementara itu, (Kurniawan, 2024) mencatat bahwa Yayasan Pendidikan Kinantan Surabaya sudah mulai menyusun laporan keuangan menggunakan kerangka ISAK 35, namun pencatatan aset tetap dan penyusutannya masih belum konsisten. (Dewi & Herawati, 2023) pun melaporkan hal serupa pada Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng, yang telah menyusun beberapa komponen laporan keuangan tetapi belum lengkap, terutama pada catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan aset neto.

Menghadapi kendala tersebut, (Audzah et al., 2024) menawarkan solusi praktis berupa penyusunan laporan keuangan berbasis ISAK 335 menggunakan Microsoft Excel pada Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin Amanah. Pendekatan ini dinilai lebih terjangkau dan realistis bagi yayasan yang belum memiliki sistem akuntansi terkomputerisasi. Keseluruhan penelitian di atas memperlihatkan bahwa masalah kepatuhan terhadap standar akuntansi nirlaba bukanlah kasus terisolasi, melainkan tantangan luas yang dihadapi entitas nirlaba di seluruh Indonesia. Dalam konteks inilah penelitian ini hadir untuk menganalisis secara mendalam kondisi penerapan ISAK 335 pada tiga entitas nirlaba di Kabupaten Tanah Datar: Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar, Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum, dan Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlas Batusangkar. Ketiga entitas ini dipilih karena memiliki karakteristik representatif untuk menggambarkan kondisi umum entitas nirlaba berbasis keagamaan dan sosial di daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan metode penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 pada tiga lembaga nirlaba berbentuk yayasan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, yakni Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar, Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum, serta Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas selaku pengelola Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlas Batusangkar. Secara lebih rinci, kajian ini ingin mengetahui sejauh mana ketiga yayasan tersebut telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka sesuai dengan ketentuan ISAK 335 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024, termasuk menelaah unsur-unsur laporan yang diwajibkan seperti laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, penelitian ini juga berupaya mengungkap berbagai hambatan yang dialami oleh masing-masing yayasan dalam mengimplementasikan standar tersebut, sekaligus menyusun saran-saran perbaikan untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan kredibel pada ketiga panti asuhan dan lembaga pendidikan tersebut di hadapan publik, para donatur, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus pada tiga organisasi nirlaba di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam kondisi aktual dari pencatatan laporan keuangan di masing-masing entitas, bukan sekadar mengukur angka atau frekuensi. Sementara itu, desain studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti menggali

informasi yang kaya dan sesuai konteks dari setiap entitas yang menjadi subjek penelitian (Sugiyono, 2022).

Adapun objek penelitian meliputi tiga entitas: (1) Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar yang didirikan sejak 1938, (2) Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum yang berdiri sejak 2006, dan (3) Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas yang beroperasi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlas Batusangkar sejak 2012. Ketiga entitas ini merupakan organisasi nirlaba berbasis sosial dan keagamaan yang bergerak dalam pemberdayaan anak yatim dan pendidikan.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui dua metode, yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, cermat, dan teratur terhadap subjek atau objek penelitian di tempat di mana peristiwa atau kegiatan sedang berlangsung. Dalam penelitian yang Anda lakukan di Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar, Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum, serta Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Ikhlas Batusangkar, metode observasi ini dijalankan dengan cara peneliti datang langsung ke masing-masing lembaga guna menyaksikan dan menelaah secara langsung proses pencatatan serta penyusunan laporan keuangan yang selama ini telah mereka praktikkan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara menghimpun data yang dilakukan melalui dialog tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan yang dipandang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu yang sedang dikaji, dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun secara sistematis (terstruktur) maupun hanya berupa garis besar permasalahan (semi-terstruktur). Pada penelitian ini, teknik wawancara difokuskan kepada individu-individu yang secara langsung menangani pengelolaan keuangan pada setiap yayasan yang menjadi objek penelitian, yaitu bendahara serta tenaga administrasi (admin) di Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar, Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum, dan Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas Batusangkar.

Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu

- 1) Reduksi Data, merupakan tahapan merangkum, memilih, dan menyederhanakan data kasar yang dikumpulkan dari lokasi penelitian supaya lebih praktis untuk dikelola serta dianalisis lebih lanjut. Pada studi ini, proses reduksi data dimulai ketika peneliti mengubah rekaman ataupun catatan langsung dari sesi wawancara menjadi transkrip tertulis secara verbatim, yaitu ditulis kata demi kata sesuai dengan ucapan asli narasumber tanpa perubahan. Di samping itu, berbagai catatan lapangan yang diperoleh dari observasi mengenai praktik pencatatan keuangan, dokumen-dokumen keuangan seperti buku kas, kwitansi, laporan bulanan, serta dokumentasi foto juga turut diseleksi dan diringkas agar hanya informasi yang relevan saja yang dipertahankan.
- 2) Penyajian data, merupakan tahapan mengorganisasikan dan memaparkan data yang telah melalui proses reduksi ke dalam susunan yang lebih rapi serta mudah dimengerti, sehingga peneliti mampu mengenali pola-pola, keterkaitan antardata, ataupun temuan-temuan penting secara menyeluruh. Bentuk penyajian data ini bisa beragam, misalnya dalam format tabel, matriks, diagram, bagan alir, maupun uraian deskriptif yang tersusun secara sistematis.

- 3) Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data, yakni ketika peneliti menafsirkan serta merumuskan arti atau makna dari data yang sudah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan wajib bertumpu pada bukti-bukti empiris yang kuat dari hasil temuan di lapangan, bukan sekadar dugaan atau opini pribadi peneliti. Dalam penelitian kualitatif seperti ini, proses penarikan kesimpulan biasanya berlangsung secara bertahap sejak awal penelitian (berupa kesimpulan sementara), kemudian terus diverifikasi ulang dengan data di lapangan hingga akhirnya diperoleh kesimpulan akhir yang benar-benar mantap dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Penyajian Keuangan pada Panti Asuhan Aisiyyah Cabang Batusangkar

Panti Asuhan Aisiyyah Cabang Batusangkar merupakan entitas nirlaba paling tua di antara ketiga objek penelitian, karena telah berdiri sejak tahun 1938. Meskipun usianya panjang dan telah beberapa kali berganti kepengurusan, dengan masa jabatan formal lima tahun sekali, panti ini belum pernah menerapkan standar akuntansi yang berlaku, baik PSAK 45, ISAK 35, maupun ISAK 335 yang berlaku saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Panti Asuhan Aisiyyah Cabang Batusangkar mereka menyatakan sebagai berikut:

“Kami melakukan pencatatan keuangan secara manual dan melalui excel sederhana. Yang kami catat hanya mengenai kas masuk dan kas keluar. Untuk kas masuk, kami menggabungkan pencatatannya yang berasal dari donator, hibah, dan pendapatan sewa. Menegani ISAK 335, jujur saja kami belum mengetahui sedikitpun mengenai aturan tersebut karna tidak ada sosialisasi dan arahan dari atasan untuk mencatat sesuai dengan ISAK 335. Kalau untuk pengeluaran kami juga mencatat namun juga dengan sederhana dan sesuai pemahaman kami saja. Untuk pencatatan asset, kami mencatat. Namun sekedar data sederhana saja. Jika sudah tidak dipakai, kami hanya menyimpannya di gudang”

Sistem pencatatan yang digunakan masih sangat sederhana, dimana para pengurus mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual serta menggunakan aplikasi Excel biasa. Dari analisis yang dilakukan, entitas ini belum menyusun komponen laporan keuangan yang diisyaratkan oleh ISAK 335 yaitu : (1). Laporan Posisi Keuangan, (2). Laporan Penghasilan Komprehensif, (3). Laporan Perubahan Asset Neto, (4). Laporan Arus Kas dan, (5). Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan yang dihasilkan berupa laporan arus kas mingguan, bulanan, dan tahunan, yang merupakan satu-satunya dari lima komponen laporan keuangan yang disyaratkan ISAK 335 yang setidaknya mendekati bentuk yang dimaksud, meskipun penyajiannya masih jauh dari memadai menurut standar yang berlaku.

Dalam hal aset, panti ini mencatat inventaris namun tidak mengetahui umur ekonomis aset dan tidak melakukan pencatatan penyusutan. Aset yang rusak hanya ditumpuk di gudang tanpa proses penghapusan atau pelepasan yang dicatat secara formal. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Kurniawan, 2024) yang menemukan hal serupa pada yayasan pendidikan, di mana pencatatan aset tetap dan penyusutannya menjadi titik lemah yang paling umum dijumpai pada entitas nirlaba.

Sumber pendapatan panti berasal dari donatur tetap dan tidak tetap, transfer dan penerimaan langsung, hibah dari pemerintah, serta pendapatan sewa tempat yang diterima per tahun. Ada pembatasan penggunaan dana dari sebagian donatur, namun pembatasan ini tidak

disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan sebagaimana disyaratkan oleh ISAK 335 melalui klasifikasi aset neto terikat dan tidak terikat.

Latar belakang bendahara yang bukan dari bidang akuntansi (melainkan administrasi) menjadi salah satu faktor yang menjelaskan keterbatasan penerapan standar akuntansi. Pelatihan yang pernah diterima pun sebatas manajemen pengelolaan panti dan tata cara pencatatan dana hibah, bukan pelatihan akuntansi berbasis standar yang berlaku. Hal ini mendukung temuan (Saharani & Abdullah, 2025) yang menyebutkan bahwa ketiadaan tenaga akuntansi yang kompeten di internal entitas nirlaba menjadi hambatan utama dalam penerapan standar pelaporan keuangan.

2. Kondisi Penyajian Keuangan pada Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum

Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum didirikan pada tahun 2006 dan memiliki struktur organisasi yang tergolong lengkap, mencakup pengurus, pengelola, serta pengawas. Panti ini mengelola dua asrama, yaitu asrama putra dan asrama putri, yang keduanya berada di bawah koordinasi kepengurusan yang sama.

Berikut hasil wawancara dengan bendahara di Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum:

"Kami disiko punyo duo asrama untuak putra dan putri, untuak keuangan kaduo asrama tu ambo surang yang maaturnyo. Untuak pencatatannyo manual dari buku samo excel. Untuak ISAK 335 tu ambo ndak ngarati do, soalnyo ndak ado pelatihan pencatatan yang sesuai ISAK 335 tu do, jadi ambo mancatat sesuai pemahaman ambo sajo yang pantiang jaleh pitih masuk jo pitih kalua nyo. Kami dapek dana ko dari hibah, donator samo sumbangan dari masyarakat dakek siko. Untuak asset kalau lah ndak tapakai tu kami simpan se di gudang ndak buliah di jua, soalnyo asset tu dari hibah".

Dalam Bahasa Indonesia:

"Kami disini punya dua asrama untuk putra dan putri, untuk keuangan kedua asrama saya yang mengaturnya. Untuk pencatatannya saya catat secara manual dan excel. Untuk ISAK 335 saya tidak mengerti karena tidak ada pelatihan pencatatan yang sesuai ISAK 335, jadi saya mencatat sesuai pemahaman saya. Yang penting jelas uang masuk dan uang keluarnya. Kami mendapatkan dana dari hibah, donator, dan sumbangan dari masyarakat sekitar. Untuk asset kalau sudah tidak terpakai kami simpan di Gudang dan tidak boleh dijual, karena asset itu dari hibah".

Dari aspek pencatatan keuangan, panti ini relatif lebih tertib dibandingkan entitas lain yang diteliti. Buku keuangan dikelola secara rapi dan arsip transaksi tersimpan dengan baik. Meskipun pencatatan sudah dilakukan dengan rapi, namun secara substansi masih jauh dari ketentuan ISAK 335. Tidak ada satu pun dari lima komponen laporan keuangan wajib yang disajikan secara lengkap dan terstruktur. Pencatatan yang dilakukan belum memenuhi standar ISAK 335. Pencatatan masih terbatas pada arus kas masuk dan keluar, tanpa menyertakan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, maupun catatan atas laporan keuangan.

Inventarisasi aset sudah dilakukan, yang menjadi pembeda dari entitas lainnya, namun belum memadai karena tidak mencakup informasi mengenai umur ekonomis, nilai perolehan, maupun akumulasi penyusutan aset. Panti ini juga tidak memiliki penghasilan lain selain dari

donatur dan hibah pemerintah, sehingga variasi sumber pendapatannya lebih sederhana dibandingkan dengan Panti Aisyiyah.

Kondisi ini menggambarkan situasi yang serupa dengan temuan (Malasai et al., 2024) pada Yayasan Panti Asuhan Pononiungan Bolaang Mongondow, di mana entitas nirlaba telah memiliki kesadaran untuk melakukan pencatatan namun belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang standar yang berlaku. Selain itu, faktor pergantian pengurus setiap lima tahun, meskipun memungkinkan petahana untuk dipilih kembali, berpotensi menimbulkan ketidakberlanjutan dalam pengelolaan pengetahuan dan praktik akuntansi.

3. Kondisi Penyajian Keuangan pada Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas di MIS Al-Ikhlas Batusangkar

Yayasan Dharma Wanita Al Ikhlas yang beroperasi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhlas Batusangkar berdiri pada tahun 2012 dan memiliki keunikan tersendiri karena berkaitan langsung dengan lembaga pendidikan formal. Struktur organisasinya mencakup pengurus, pengelola, dan pengawas, dengan kepengurusan yang bersifat kondisional sehingga tidak memiliki periode jabatan yang kaku.

Hasil wawancara dengan bendahara di Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas di MIS Al-Ikhlas Batusangkar adalah sebagai berikut:

“Yayasan ini berada di bawah naungan Menteri agama. Karna Yayasan ini belum lama berdiri, jadi kami belum mempunyai donatur tetap. Jadi kami disini hanya mengandalkan uang dari BOS dan dari Yayasan pusat. Mengenai ISAK 335 yang ananda tanyakan tadi, kami belum menerapkannya untuk pencatatan keuangan di MIS ini. Tapi kami sudah mencatat transaksi keuangan tentang uang masuk dan uang keluar. Alasan kami belum menerapkannya itu karna belum ada pelatihan yang mengajarkan tentang pencatatan keuangan yang sesuai dengan ISAK 335 itu. Untuk asset di Yayasan ini tidak begitu banyak karna disini kami mengalami kekurangan dana, sehingga jarang sekali kami membeli asset baru”.

Pencatatan keuangan dilakukan secara manual dan menggunakan Excel sederhana, dengan laporan pemasukan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Tidak ada batasan penggunaan dana dari donatur, dan sumber donasi pun bersifat tidak tetap. Pengadaan aset dilakukan dari dana BOS atau dana dari yayasan, dan aset baru dibeli ketika yang lama sudah sangat rusak tanpa perencanaan penggantian yang sistematis.

Kondisi yang paling menonjol dari yayasan ini adalah latar belakang pendidikan bendahara yang merupakan sarjana hukum, yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang regulasi akuntansi. Hal ini menjadikan pencatatan keuangan sepenuhnya bersifat intuitif dan tidak mengacu pada standar mana pun. Situasi ini sangat mirip dengan temuan (Iliyin & Pratiwi, 2023), di mana transparansi internal mungkin terjaga tetapi pertanggungjawaban kepada pihak luar tidak terstruktur secara standar.

Sama seperti dua entitas lainnya, yayasan ini tidak mengetahui umur ekonomis aset, tidak melakukan penyusutan, dan menyimpan aset rusak di gudang tanpa pencatatan penghapusan. Tidak adanya pemahaman tentang PSAK 45, ISAK 35, apalagi ISAK 335, membuat pengelolaan keuangan yayasan ini sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan pemahaman pribadi bendahara yang bersangkutan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Yayasan

Akuntabilitas dan transparansi adalah unsur kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan anggaran yang tepat sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan organisasi, mengingat erat kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua prinsip penting yang tidak bisa dipisahkan dari pengelola organisasi nirlaba. Yayasan sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan memiliki tanggung jawab moral untuk mempertanggungjawabkan seluruh dana yang diterima kepada donatur maupun kepada pihak yang berkepentingan. Penerapan akuntabilitas dan keterbukaan membawa banyak keuntungan bagi lembaga. Keduanya dapat memperkuat rasa percaya masyarakat, memudahkan pengawasan, menghindari kemungkinan korupsi atau penyalahgunaan dana, serta mendukung kelangsungan organisasi dalam waktu yang lama. Maka dari itu, lembaga perlu mengadopsi sistem pencatatan keuangan yang baik, memakai standar akuntansi yang tepat, dan melakukan evaluasi secara berkala agar pengelolaan keuangan berjalan dengan efektif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun secara baik menjadi salah satu bentuk nyata dari pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, ketiga yayasan telah berupaya menjaga pertanggungjawaban internal melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana. Setiap transaksi dicatat dan disimpan sebagai arsip lembaga. Namun, pencatatannya masih bersifat administratif dan belum mampu memberikan informasi lengkap mengenai kondisi keuangan yayasan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang dilakukan masih terbatas pada penyampaian penggunaan kas, belum sampai pada penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi entitas nirlaba.

Kondisi ini menyebabkan transparansi informasi keuangan belum optimal. Donatur maupun pihak lain yang berkepentingan hanya mendapatkan informasi sederhana mengenai jumlah dana masuk dan dana keluar tanpa mengetahui posisi aset, perubahan aset neto, maupun penggunaan dana yang memiliki pembatasan tertentu. Akibatnya, tingkat keterbukaan informasi menjadi terbatas dan potensi terjadinya kesalahan pemahaman dalam penggunaan dana bisa terjadi.

Penerapan akuntabilitas dan transparansi penting untuk sebuah organisasi atau yayasan untuk keberlangsungan Yayasan (Fajri et al., 2020). Semakin jelas informasi keuangan yang disampaikan maka semakin besar keyakinan masyarakat terhadap integritas pengelolaan yayasan, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana memperkuat legitimasi lembaga di tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa rendahnya penerapan prinsip transparansi bukan karena unsur kesengajaan, melainkan karena tidak adanya pelatihan, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis pengurus dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi perlu dilakukan bersamaan dengan pendampingan teknis penyusunan laporan keuangan.

5. Analisis Kesenjangan dengan ISAK 335

ISAK 335 didasari oleh tiga alasan utama. Pertama, terdapat ketidakkonsistenan karena dua standar yang mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu PSAK 201 dan PSAK 45, berada dalam kelompok yang sama. Kedua, secara substansi, ruang lingkup PSAK 201 sebenarnya telah mencakup entitas yang menjalankan kegiatan nonlaba. Ketiga, perbedaan pokok antara entitas nonlaba dan entitas bisnis yang mencari laba terletak pada cara mereka mendapatkan sumber daya. Entitas nonlaba memperolehnya dari pemberi yang tidak mengharapkan pengembalian dana maupun imbalan ekonomi yang sepadan (IAI, 2025).

Suatu entitas nirlaba menurut ISAK 335 (IAI, 2025) harus memenuhi lima komponen laporan keuangan, yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan gambaran mengenai keadaan kekayaan suatu yayasan pada saat tertentu, yang mencakup tiga komponen pokok, yakni Aset (segala sesuatu yang dikuasai atau dimiliki oleh yayasan), Kewajiban atau utang (segala hal yang menjadi beban tanggungan yayasan kepada pihak lain), serta Aset Neto (selisih lebih antara aset setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban, yang pada dasarnya memiliki kesetaraan dengan istilah ekuitas dalam dunia usaha komersial).

Contoh Penerapannya:

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan

Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum			
Laporan Posisi Keuangan			
Per 31 Desember 2024			
(dalam Rupiah)			
Aset			
Aset Lancar			
Kas	50.000.000	Kewajiban & Aset Neto	
Bank	75.000.000	Kewajiban	20.000.000
Piutang Donasi	10.000.000	Utang Usaha	15.000.000
Total Aset Lancar	135.000.000	Utang Gaji	35.000.000
		Total Kewajiban	
Aset Tetap			
Tanah dan Bangunan	200.000.000	Aset Neto	
Kendaraan	50.000.000	Aset Neto Tanpa	150.000.000
Akumulasi Penyusutan	(20.000.000)	Pembatasan	
Total Aset Tetap	230.000.000	Aset Neto dengan Batasan	
		-Pembatasan tujuan	50.000.000
		-Pembatasan waktu	30.000.000
		Total Aset Neto	230.000.000
Total Aset	365.000.000	Total Kewajiban dan Aset	
		Neto	365.000.000

Sumber : Data diolah, 2026

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan ini menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dalam suatu periode, termasuk OCI. Seluruh pos dalam laporan ini dikelompokkan menurut klasifikasi aset neto, apakah termasuk dalam kelompok dengan pembatasan atau tanpa pembatasan.

Contoh Penerapannya:

Tabel 2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum			
Laporan Penghasilan Komprehensif			
Per 31 Desember 2024			
(dalam Rupiah)			
		Beban	
		Beban tanpa Batasan	120.000.000
Pendapatan	200.000.000	-Beban Program	60.000.000
Pendapatan tanpa batasan	50.000.000	-Beban Operasional	
-Sumbangan/donasi		Beban dengan batasan	80.000.000
-Hasil usaha yayasan		-Beban Program	260.000.000
		Total Beban	
Pendapatan dengan batasan	100.000.000		
-Sumbangan/donasi	350.000.000	Surplus (Defisit)	70.000.000
Total Pendapatan		-Surplus tanpa Batasan	
		-Surplus dengan Batasan	20.000.00
		Total Surplus (Defisit)	90.000.000
		Total Beban dan	350.000.000
		Surplus (Defisit)	

Sumber : Data diolah, 2026

3. Laporan Perubahan Aset Neto

Laporan ini menunjukkan bagaimana aset neto bertambah atau berkurang selama periode pelaporan. Yang khas adalah adanya pos reklasifikasi, yaitu pemindahan dana dari kategori “dengan pembatasan” ke “tanpa pembatasan” setelah batasan yang ditentukan (waktu atau tujuan) dinyatakan selesai.

Contoh Penerapannya:

Tabel 3. Laporan Perubahan Aset Neto

Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum			
Laporan Perubahan Aset Neto			
Per 31 Desember 2024			
(dalam Rupiah)			
Keterangan	Tanpa Batasan	Dengan Batasan	Total
Saldo awal aset neto	120.000.000	50.000.000	170.000.000
Surplus tahun berjalan	70.000.000	20.000.000	90.000.000
Reklasifikasi:			
-Batasan terpenuhi (program beasiswa selesai)	100.000.000	(10.000.000)	0
-Batasan waktu habis	5.000.000	(5.000.000)	0
Saldo Akhir aset neto	205.000.000	55.000.000	260.000.000

Sumber : Data diolah, 2026

4. Laporan Arus Kas

Laporan ini menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis aktivitas: operasional, investasi, dan pendanaan. Strukturnya serupa dengan laporan arus kas pada entitas bisnis pada umumnya.

Contoh Penerapannya:

Tabel 4. Laporan Arus Kas

Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2024 <i>(dalam Rupiah)</i>	
Arus kas dari aktivitas operasional	350.000.000
-Penerimaan donasi & sumbangan	(260.000.000)
-Pembayaran beban program & operasional	
Total Kas Bersih dari Operasional	90.000.000
Arus kas dari aktivitas investasi	
-Pembelian kendaraan	(50.000.000)
Total Kas bersih untuk investasi	(50.000.000)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
-Penerimaan pinjaman bank	0
Total Kas bersih dari Pendanaan	0
Kenaikan (Penurunan) Kas bersih	40.000.000
Kas awal periode	85.000.000
Kas akhir periode	125.000.000

Sumber : Data diolah, 2026

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Bagian ini berisi penjelasan tambahan yang merinci angka-angka dalam laporan utama. Beberapa contoh pengungkapan yang khas bagi entitas nonlaba meliputi perlakuan atas hibah yang diterima, rincian aset neto yang dibatasi peruntukannya, informasi mengenai dana abadi (endowment fund), serta bagaimana beban dialokasikan ke masing-masing program atau aktivitas.

CALK bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral yang menjelaskan rincian angka-angka dalam empat laporan di atas. Untuk yayasan, hal-hal yang wajib diungkap dalam CALK antara lain:

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan

Contoh: "Yayasan mengakui donasi sebagai pendapatan pada saat kas diterima (basis kas), kecuali donasi yang bersifat multi-tahun yang diakui secara proporsional."

- b. Rincian aset neto dengan pembatasan
Contoh: "Pada 31 Desember 2024, aset neto dengan pembatasan sebesar Rp55.000.000 terdiri dari: (1) Pembatasan tujuan beasiswa sebesar Rp25.000.000 yang harus tersalurkan pada 2025, (2) Pembatasan waktu untuk program pemberdayaan anak asuh sebesar Rp30.000.000 yang hanya dapat digunakan pada semester I 2025."
- c. Informasi dana abadi (endowment) jika ada
Contoh: "Yayasan memiliki dana abadi sebesar Rp100.000.000 yang ditempatkan dalam deposito berjangka. Yang boleh digunakan hanya hasil bunga deposito, sementara pokoknya tidak boleh ditarik."
- d. Alokasi beban ke program dan aktivitas
Contoh: "Beban program sebesar Rp200.000.000 dialokasikan ke program pendidikan (60%), program pangan anak asuh (30%), dan program kesehatan (10%)."
- e. Informasi hibah atau sumbangan non-kas
Contoh: "Yayasan menerima hibah berupa 1 unit mobil pick-up dengan nilai wajar Rp150.000.000 yang digunakan untuk mobilitas kegiatan sosial."

Kelima komponen tersebut secara bersama-sama membentuk satu kesatuan laporan keuangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan oleh entitas nonlaba.

Rincian tingkat kelengkapan setiap komponen laporan keuangan pada masing-masing entitas yang menjadi sampel penelitian, berdasarkan kesesuaiannya dengan ISAK 335, disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 5. Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan sesuai ISAK 335

Komponen ISAK 335	Panti Asuhan Aisyiyah Batusangkar	Panti Asuhan Muhammadiyah Lima Kaum	Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas di MIS Al-Ikhlas	Keterangan
Laporan Posisi Keuangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum Memenuhi
Laporan Penghasilan Komprehensif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum Memenuhi
Laporan Perubahan Aset Neto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum Memenuhi
Laporan Arus Kas	Ada (Sederhana)	Ada (Sederhana)	Ada (Sederhana)	Parsial (Belum Standar)
Klasifikasi Aset Neto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum Memenuhi
Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Belum Memenuhi

Sumber : Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, ketiga entitas yang diteliti belum sepenuhnya mematuhi ISAK 335. Dari lima komponen laporan keuangan yang diwajibkan, hanya laporan arus kas yang

sudah mulai tersedia di ketiga entitas, meskipun penyajiannya masih jauh dari standar. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hasanah et al., 2022) tentang penerapan ISAK 35 di panti asuhan Jember, yang juga menemukan bahwa laporan arus kas merupakan satu-satunya komponen yang hampir terpenuhi, sementara komponen lain tidak ada.

Kondisi paling serius adalah tidak adanya laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan di ketiga entitas. Padahal, laporan posisi keuangan penting untuk menyajikan gambaran menyeluruh tentang aset, liabilitas, dan aset neto entitas pada periode tertentu. Sementara itu, catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk menjelaskan dan mengungkapkan angka-angka yang disajikan; tanpanya, laporan keuangan kehilangan konteks dan sulit dipahami pengguna (Fitri & Dkk, 2023).

Selain itu, tidak adanya klasifikasi aset neto menjadi masalah tersendiri, terutama bagi Panti Asuhan Aisyiyah yang menerima dana dengan pembatasan dari donatur. ISAK 335 mewajibkan entitas nirlaba memisahkan aset neto terikat donor dan tidak terikat dalam laporan keuangan. Tanpa pemisahan ini, transparansi informasi tentang fleksibilitas penggunaan dana menjadi kurang bagi pemangku kepentingan (Audzah et al., 2024).

Masalah pencatatan aset juga ditemukan secara konsisten di ketiga entitas. Tidak adanya catatan umur ekonomis dan penyusutan aset menyebabkan nilai aset yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada keputusan perencanaan penggantian aset dan alokasi anggaran. (Julyana et al., 2024) dalam penelitiannya di Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Sukabumi juga menemukan bahwa pencatatan aset tetap merupakan area dengan tingkat kepatuhan terendah terhadap standar nirlaba.

6. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan ISAK 335

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan lima faktor utama yang secara konsisten menghambat penerapan ISAK 335 pada ketiga entitas.

Pertama, keterbatasan pemahaman tentang regulasi akuntansi. Pemahaman para bendahara terhadap regulasi akuntansi masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, para bendahara belum familiar dengan ISAK 35, ISAK 35, maupun PSAK 45. Pengetahuan mereka lebih banyak bersumber dari praktik pencatatan sederhana yang dipelajari secara mandiri selama mengelola keuangan entitas”

Kedua, latar belakang pendidikan bendahara yang bukan dari bidang akuntansi atau keuangan turut mempengaruhi kualitas pencatatan. Bendahara Panti Aisyiyah berlatar administrasi, sementara bendahara Yayasan Al-Ikhlas berlatar hukum. Meskipun kompeten di bidangnya masing-masing, mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar. Kondisi ini juga ditemukan dalam penelitian-penelitian serupa (Anjani & Bharata, 2022).

Ketiga, minimnya pelatihan dan pendampingan akuntansi menjadi kendala struktural. Ketiga entitas belum pernah mendapatkan pelatihan akuntansi berdasarkan standar resmi. Pelatihan yang diikuti hanya seputar manajemen operasional dan pencatatan teknis dana hibah. Padahal, (Tartila et al., 2023) membuktikan bahwa pendampingan terstruktur dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan kemampuan pengurus secara signifikan.

Keempat, pergantian kepemimpinan secara periodik atau kondisional berisiko menghilangkan institutional memory dalam pengelolaan keuangan. Pengetahuan pengurus

lama tidak selalu diwariskan dengan baik kepada pengurus baru, sehingga setiap periode kepengurusan cenderung memulai pemahaman akuntansi dari nol (Multazam, 2023)

Kelima, terbatasnya sumber daya finansial untuk merekrut tenaga akuntan profesional atau membangun sistem informasi keuangan menjadi hambatan nyata. Entitas nirlaba skala kecil seperti yang diteliti lebih memprioritaskan dana terbatas untuk kegiatan sosial utama, sehingga investasi pada sistem akuntansi sering ditunda. (Audzah et al., 2024) menawarkan solusi menggunakan Microsoft Excel yang lebih terjangkau, dan pendekatan ini dapat menjadi langkah awal yang realistis bagi ketiga entitas tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi rendahnya akuntabilitas keuangan entitas nirlaba di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Dengan menggali secara mendalam kondisi riil pencatatan keuangan pada ketiga entitas serta membandingkannya dengan ketentuan ISAK 335, penelitian ini menghasilkan peta kesenjangan (gap analysis) yang rinci. Peta ini menjadi titik awal yang konkret bagi pengelola entitas untuk mengetahui aspek mana yang perlu diperbaiki dan diprioritaskan dalam upaya menuju kepatuhan terhadap standar (Fitri & Dkk, 2023).

Secara praktis, temuan ini memberikan dasar rekomendasi yang kontekstual dan realistis sesuai kapasitas masing-masing entitas. Untuk Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar yang telah memiliki catatan arus kas mingguan dan bulanan, langkah paling memungkinkan adalah mengembangkan catatan tersebut secara bertahap menjadi laporan arus kas sesuai format ISAK 335, kemudian menyusun laporan posisi keuangan sederhana berbasis inventarisasi aset yang sudah ada. Bagi Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum yang pengelolaan buku keuangannya relatif lebih rapi dan telah memulai inventarisasi aset, pengembangan dapat difokuskan pada pelengkapan data aset (umur ekonomis dan nilai perolehan), serta penyusunan laporan aktivitas dan laporan perubahan aset neto. Sedangkan untuk Yayasan Dharma Wanita Al-Ikhlas, prioritas utama adalah meningkatkan kapasitas bendahara melalui pelatihan akuntansi dasar sebagai fondasi sebelum menerapkan komponen laporan keuangan ISAK 335 secara bertahap (Audzah et al., 2024).

Dalam lingkup yang lebih luas, penelitian ini menjembatani kesenjangan informasi antara regulasi akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan kenyataan di lapangan pada entitas nirlaba skala kecil. Dengan mendokumentasikan secara kualitatif hambatan spesifik yang dihadapi entitas nirlaba berbasis keagamaan dan sosial, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi, lembaga profesi akuntansi, dan instansi pemerintah dalam merancang program pendampingan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan bertahap yang direkomendasikan, termasuk pemanfaatan template Microsoft Excel berbasis ISAK 335 seperti yang diusulkan (Audzah et al., 2024), dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara tuntutan standar dan kapasitas riil entitas nirlaba skala kecil (Tartila et al., 2023).

7. Strategi Pengembangan Pengelolaan Keuangan Yayasan

Dalam pelaksanaan strategi pengembangan pengelolaan keuangan yayasan, (Respati, 2025) mengatakan, pendekatan untuk mengembangkan pengelolaan keuangan yayasan berfokus pada lima pilar utama guna menciptakan pengelolaan yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, manajemen yayasan harus mengimplementasikan pemilihan standar akuntansi yang sesuai dan logis, yaitu dengan mengadopsi Standar Akuntansi untuk Entitas Nonlaba (ISAK 35). Standar ini dianggap sangat penting bagi

yayasan yang memiliki aktivitas kompleks, seperti program pendidikan atau kesehatan jangka panjang, serta menerima berbagai sumber dana dari donatur individu, sektor swasta, maupun pemerintah. Dengan menerapkan ISAK 35, seluruh laporan keuangan, termasuk neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset yang dikelola, laporan arus kas, serta catatan laporan keuangan, perlu disusun dengan teratur dan berdasarkan akrual demi menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Kedua, yayasan perlu mempercepat digitalisasi dan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dengan mendirikan sistem pengelolaan data keuangan yang berbasis komputer dengan baik. Pengembangan SIA ini harus diiringi dengan sistem pengendalian internal yang solid untuk menjamin keamanan data, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan, serta memastikan kelancaran seluruh proses administratif keuangan.

Ketiga, diperlukan strategi untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi melalui penyusunan laporan keuangan yang terperinci, jelas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum. Usaha ini tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga sebagai langkah cerdas untuk membangun reputasi dan menjaga dukungan finansial yang berkelanjutan dari para donatur. Keempat, demi menguji keandalan internal, lembaga sebaiknya bersikap terbuka terhadap pelaksanaan audit mandiri secara rutin. Audit dari pihak luar ini berfungsi sebagai alat evaluasi utama untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan, menemukan kekurangan dalam pengelolaan dana, dan memastikan kegiatan yayasan terlaksana sesuai dengan prinsip akuntansi yang tepat. Terakhir, pendekatan ini perlu didukung oleh investasi dalam pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pelatihan akuntansi bagi karyawan di sektor keuangan. Dengan memastikan bahwa karyawan memahami standar akuntansi nirlaba yang benar, lembaga dapat menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya memperkuat posisi operasional serta legitimasi sosial organisasi di dalam masyarakat.

Melihat kondisi yang ditemukan dilapangan, penerapan ISAK 335 pada entitas nirlaba perlu dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing yayasan. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sistem pencatatan kas yang sudah ada menjadi lebih terstruktur. Catatan pemasukan dan pengeluaran dapat dikembangkan menjadi laporan arus kas sederhana yang disusun secara priodik dan konsisten. Selanjutnya melakukan pendataan aset secara lebih lengkap. Yayasan perlu mulai mencatat informasi mengenai jenis aset, tahun perolehan, kondisi aset, serta estimasi masa manfaatnya. Pendataan tersebut bisa membantu yayasan mengetahui nilai aset yang dimiliki sekaligus mempermudah proses pengawasan dan perencanaan pengadaan di masa mendatang.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia juga penting. Pada ketiga yayasan, pengurus belum memperoleh pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan standar. Oleh karena itu, pelatihan sederhana mengenai dasar-dasar akuntansi dan pengelolaan laporan keuangan perlu diberikan agar bendahara maupun pengurus dapat memahami prosedur pencatatan yang benar.

Dengan adanya perbaikan bertahap tersebut, yayasan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat. Laporan keuangan yang baik tidak hanya berguna untuk administrasi, tetapi juga

bentuk tanggungjawab moral lembaga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung kegiatan sosial dan pendidikan yang dijalankan yayasan.

Simpulan

Dari hasil telaah terhadap tiga lembaga nirlaba yang menjadi subjek penelitian, yakni Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Batusangkar, Panti Asuhan Muhammadiyah Cabang Lima Kaum, serta Yayasan Dharma Wanita Al Ikhlas yang bernaung di bawah MIS Al Ikhlas Batusangkar, dapat ditarik simpulan bahwa tak satu pun di antara mereka yang telah mengimplementasikan ISAK 335 secara layak dan sesuai ketentuan. Dari seluruh lima unsur laporan keuangan yang diwajibkan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, hanya laporan arus kas yang tersedia dalam wujud sangat sederhana berupa buku catatan penerimaan dan pengeluaran kas, sementara keempat komumen lainnya sama sekali tidak dijumpai. Dengan demikian, penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 335 pada ketiga yayasan tersebut masih tergolong sangat minim, bahkan bisa dikatakan belum dimulai, sebab laporan yang selama ini dihasilkan hanya berfokus pada pencatatan arus kas masuk dan keluar tanpa mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Berbagai kendala yang menjadi penghambat utama antara lain adalah ketidaktahuan para pengurus terhadap aturan akuntansi, latar belakang pendidikan bendahara yang tidak terkait dengan ilmu akuntansi, kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis yang mengacu pada standar, risiko hilangnya pemahaman karena seringnya pergantian pengurus, serta terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mengembangkan sistem akuntansi. Seluruh faktor penghambat ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang menyeluruh. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar institusi perguruan tinggi, organisasi profesi akuntansi, serta instansi pemerintah turut serta memberikan bimbingan teknis secara berkesinambungan kepada entitas nirlaba dalam menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada ISAK 335. Pemanfaatan sarana bantu praktis seperti templat berbasis Microsoft Excel yang sudah disesuaikan dengan format ISAK 335 dapat menjadi langkah awal yang realistis. Di samping itu, upaya merekrut atau menugaskan bendahara yang berlatar belakang pendidikan akuntansi menjadi langkah penting bagi ketiga lembaga tersebut ke depannya. Penelitian ini juga mengungkap bahwa penerapan prinsip akuntabilitas serta transparansi pada ketiga yayasan masih belum optimal, karena laporan keuangan yang disusun belum sanggup menyajikan informasi keuangan secara utuh kepada pihak-pihak eksternal. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya wawasan para pengurus mengenai standar akuntansi khusus entitas nirlaba. Karena itu, pengembangan tata kelola keuangan perlu dijalankan secara berjenjang melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendokumentasian aset yang lebih teratur, serta penyusunan laporan keuangan ringkas yang berbasis ISAK 335, agar mutu pengelolaan yayasan dapat meningkat dan kepercayaan publik tetap terpelihara.

Kajian ini mengandung sejumlah batasan, di antaranya: (1) cakupan penelitian hanya meliputi tiga entitas nirlaba di Kabupaten Tanah Datar, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh yayasan yang ada di Indonesia; (2) teknik pengumpulan data hanya bertumpu pada observasi dan wawancara, tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh arsip keuangan historis milik yayasan; (3) penelitian ini tidak melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat kesiapan maupun kepatuhan yayasan terhadap setiap rincian aturan dalam ISAK 335; (4) keterbatasan waktu penelitian mengakibatkan tidak dilakukannya uji coba langsung atas implementasi penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 335 di lapangan; serta (5) adanya potensi

bias informasi dari narasumber, mengingat kemungkinan para pengurus yayasan memberikan tanggapan yang bersifat normatif atau kurang jujur mengenai praktik pencatatan keuangan mereka.

Bagi para peneliti yang bermaksud melanjutkan kajian serupa, disarankan agar: (1) memperluas jangkauan objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak yayasan dari berbagai kabupaten atau provinsi supaya hasil yang diperoleh lebih representatif; (2) menggunakan metode penelitian tindakan dengan cara turut mendampingi secara langsung yayasan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan ISAK 335, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas pendampingan tersebut; (3) menyusun instrumen penilaian kepatuhan berbasis sistem skoring guna mengukur secara kuantitatif tingkat penerapan setiap komponen laporan keuangan; (4) melakukan penelitian dalam rentang waktu yang Panjang untuk mengamati perkembangan penerapan ISAK 335 selama beberapa tahun ke depan; serta (5) meneliti faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan pada yayasan-yayasan yang telah mampu menerapkan ISAK 335 dengan baik, sehingga dapat dijadikan contoh pembelajaran bagi yayasan lain yang masih mengalami kesulitan.

Daftar Pustaka

- Anjani, S. A., & Bharata, R. W. (2022). Analisis penerapan ISAK No 35 tentang penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba pada Yayasan Hati Gembira Indonesia (Happy Hearts Indonesia). *Akuntansiku*, 1(2), 288–298.
- Audzah, S., Purwohedi, U., & Nindito, M. (2024). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 pada Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin Amanah menggunakan Microsoft Excel. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(12), 246–255.
- Dewi, N. K. I. P., & Herawati, N. T. (2023). Penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(2), 286–298.
- Direktorat, J. A. H. U. (n.d.). *Ditjen AHU Gelar Dua Webinar Terkait Pemilik Manfaat Yayasan atau Perkumpulan, dan Kebijakan Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing*. 2022.
- Fajri, D., Rizal, & Nofrivul. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A ' Yun. *JAKSyA: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1).
- Fitri, S. A., & Dkk. (2023). *Akuntansi Organisasi Nirlaba*. Sada Kurnia Pustaka.
- Fitri, S. A., Ramadhani, Alhumairo, & Dkk. (2025). Usulan penerapan ISAK 335 dalam penyajian laporan keuangan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Hamzah Ludin. *JKAMTB: Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis*, 7(1), 510.
- Hasanah, N. L., Yulinartati, & Martiana, N. (2022). Analisis penerapan ISAK 35 pada Yayasan Panti Asuhan Jombang Jember. *UMJember Proceeding Series*, 1(5), 656–664.
- IAI. (2025). *Discussion Paper Post-Implementation Review ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

- Iliyin, F. A., & Pratiwi, B. Y. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Attafakur. *Aseri: Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(2), 147–153.
- Julyana, F., Sulaeman, & Himawan, I. S. (2024). Analisis penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada yayasan: Studi kasus pada Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Raudlatul Athfal “Al-Ikhlas” Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 484–499.
- Kurniawan, A. (2024). Penerapan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba: Studi kasus Yayasan Pendidikan Kinantan Surabaya. *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram*, 2(2), 313–337.
- Malasai, F., Elim, I., & Kalalo. (2024). Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba berdasarkan ISAK Nomor 35 pada Yayasan Panti Asuhan “Pononiungan” Bolaang Mongondow. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(2), 295–304.
- Multazam. (2023). *Buku ajar hukum perusahaan*. UMSIDA Press.
- Nurhidayat, R. A., & Dewantara, G. F. (2026). Analisis kesesuaian penerapan ISAK 335 dalam penyusunan laporan keuangan yayasan kemanusiaan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 3(2), 86–95.
- Prayitno. (2025). *Modul ISAK 335*. Re.Search.
- Respati, H. (2025). Strategi Penggunaan Standar Akuntansi Entitas Nirlaba dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Yayasan di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2745–2749.
- Saharani, N. N., & Abdullah. (2025). Inisiasi penerapan ISAK 335 pada laporan keuangan yayasan: Studi kasus pada Yayasan Hidayatullah Kabupaten Kepahiang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(10), 3687–3703.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tartila, L., Fitri, S. A., Rahmi, M., Fitria, N., & Masdar, R. (2023). Pendampingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK No 35 di Yayasan Puri Ratna Juwita. *MADANI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Kewirausahaan*, 1(4), 183–190.